

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bentuk iuran tentu untuk pemerintah yang terutang baik dari orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat menuntut yang telah ditetapkan berdasarkan undang – undang, yang menjadi sumber penghasilan untuk negara serta dipergunakan bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat . Pajak menjadi salah satu alternatif penerimaan negara yang berpotensi besar. Oleh sebab itu wajiib pajak baik perorangan ataupun Wajiib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menyetor pajak terutangnya .

Menunaikan pembayaran pajak merupakan keharusan seluruh warga negara kecuali untuk mereka yang dikecualikan dari undang – undang dasar. Lantaran sifat pajak menuntut, maka Wajiib pajak yang tidak menunaikan pembayaran pajak akan diberi hukuman. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan hukuman pelanggaran perpajakan terbagi atas hukuman administrasi dan hukuman pidana . Pemberian hukuman ini memiliki tujuan untuk menciptakan kepatuhan oleh para wajib pajak sendiri .

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan terkait perpajakan dituntut untuk dapat menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat atau wajib pajak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat keluhan yang datang dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, dalam jumlah pengaduan terkait pelayanan perpajakan prosentase terbesar mengenai masalah pelayanan yang masih kurang memuaskan. Dimana hal yang sering dilaporkan ialah mengenai kualitas pengetahuan dan pengalaman dari pegawai, dan etika pegawai. Oleh sebab itu sistem dan prosedur terkait pembayaran pajak yang ada perlu ditingkatkan supaya penerimaan negara terkait pajak lebih maksimal serta untuk menciptakan kepuasan Pembayar Pajak dan kenaikan keterlibatan Pembayar Pajak dalam proses membayar pajak yang dapat mendorong proses pembangunan diindonesia.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah. Instansi ini mempunyai tugas dibidang penanaman modal, jasa yang diberikan pemerintah dari perizinan maupun non perizinan . Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat terlaksana secara maksimal. dikarenakan didukung oleh berbagai faktor, dimana untuk menunjang proses pelayanan dibutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. Pembelian alat dan instrumen yang digunakan tentunya bersumber dari anggaran APBN/APBD. Segala pengeluaran yang dibiayai oleh dana APBN/APBD tentunya harus dilaporkan dengan jelas penggunaannya.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah badan negara yang menjadi salah satu wajib pajak. Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang bersumber dari penerimaan pajak dan redistribusi daerah, dimana pendapatan pajak menjadi sumber penting, Pendapatan pajak untuk setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang selaku salah satu badan pemerintahan yang melakukan prosedur pembayaran pajak setiap tahunnya. Prosedur Pembayaran Pajak pada dasarnya memiliki ketentuan yang hampir sama, biasanya terdapat perbedaan dari tenggang waktu yang diberikan tergantung dari jenis pajak terutang. Prosedur pembayaran pajak yang ada seharusnya dapat dipahami dengan mudah oleh semua orang, karena hal ini berkaitan dengan efektifitas penerimaan pajak. penyetoran pajak telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang terdapat Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang mungkin bisa saja terjadi dalam operasinya maka perlu dilakukan evaluasi supaya dapat melihat adanya praktek yang terlaksana selama ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat pokok pembahasan mengenai “ANALISIS PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK UNTUK PENGADAAN BARANG

DAN JASA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG “ .

1.2 Rumusan Masalah

Pokok bahasan yang akan penulis sampaikan diambil dari latar belakang tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak untuk pengadaan barang dan jasa pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Prosedur pembayaran pajak untuk Pengadaan barang dan jasa yang terjadi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang dilaksanakan tujuan yang hendak diraih yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui apakah prosedur pembayaran pajak untuk pengadaan barang dan jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan ketentuan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian bisa dipergunakan sebagai masukan didalam hal prosedur pembayaran pajak dimasa yang akan datang.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian bisa menambah pengetahuan dan ilmu untuk para pembaca tentang prosedur pembayaran pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian bisa dijadikan saran bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk dapat melaksanakan evaluasi pengoptimalan prosedur pembayaran pajak.

- b. Diharapkan hasil dari penelitian bisa difungsikan menjadi salah satu alternatif untuk penerapan prosedur pembayaran pajak di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang.

